

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andasasmita, K. (1986). *Hukum Apartemen: Rumah Susun*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. (1994). *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Kedudukan Hukum dan Sertifikat Pemilikan Rumah Susun*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badruzaman, M. D. (1981). *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Jakarta: Alumni.
- Budiono, H. (2008). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Halim, R. (1990). *Hak Milik, Kondominium, dan Rumah Susun*. Jakarta: Puncak Karma.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hermit, H. (2009). *Komentar Atas Undang-Undang Rumah Susun*. Bandung: Mandar Maju.
- Hernoko, A. Y. (2013). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Reyka Petra Media.
- Kamilah, A. (2013). *Bangunan Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik)*. Bandung: CV Keni Media.
- Komariah. (2002). *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Muhammad, A. (2006). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muliadi, K., & Widjaja, G. (2006). *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Patrik, P. (1986). *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Santoso, D., & Ali, A. (1989). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Santoso, U. (2017). *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Jakarta: Kencana.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sumardjono, M. S. (2008). *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*. Jakarta: Kompas.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Rumah Susun dan Apartemen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjachran, R. (2021). *Hukum Properti: Karakteristik Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Inden*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeni, S. R. (n.d.). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2001). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wigysubroto, S. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM HUMA.
- Yudohusodo, S. (1991). *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: INKOPPOL.
- Zainuddin, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

PUBLIKASI ILMIAH/JURNAL

- Achtier, F., & et. al. (n.d.). Tipologi Pengembangan Lingkungan Hunian Vertikal di Kawasan Perkotaan. *Seminar Nasional Rekayasa dan Teknologi*. 2019.

- Amasangsa, M. A., & Priyanto, I. M. (2019). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. *Kertha Semaya*.
- Budhayati, C. T. (2009). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Widya Sari*.
- Isnaeni, M. (2016). Kebatalan, Batal, dan Syarat Batal dalam Perjanjian Timbal Balik. *Kuliah Umum Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat*. Banjarmasin.
- Kurniati, N. (2014). Pemenuhan Hak Atas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan BUdaya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Menggapai Mimpi di Rusun Tinggi. *Maisona*.
- Larasi, F. R., & Bakri, M. (2018). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Putusan Hakim Dalam Pemebritan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Bagik. *Jurnal Konstitusi*.
- Marzuki, P. M. (2003). Batal-Batal Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Yuridika*.
- Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.
- Purbandari. (2012). Kepastian dan Perlindungan Hukum pada Pemasaran Properti dengan Sistem Pre Project Selling. *E-Journal Widya*.
- Trianto & Adjie, H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap KOnsumen Atas Perjanjian Pendahuluan Dalam Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun yang Dipasarkan dengan Cara Pre Project Selling. *Res Judicata*.
- Saputri, E. M., Waspiah, & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Hal Pengembang (developer) Apartemen Dinyatakan Pailit. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*.

INTERNET

- Authoriti, Urban Redevelopment. (n.d.). www.ur.gov.sg. Retrieved from <http://www.ur.gov.sg/uol/guide-lines-residential-property/Home-Buyers.aspx> dilihat
- Bahfein, S. (2020). *kompas.com*. Retrieved from Tren Pengaduan Properti Naik, YLKI Desak Pemerintah Bikin Organisasi Perlindungan Konsumen:

<https://www.kompas.com/properti/read/2023/01/20/200000821/tren-pengaduan-properti-naik-ylki-desak-pemerintah-bikin-organisasi>

Data retrieved from dataindonesia.id Badan Pusat Statistik: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275.77 juta Pada 2022

rumah.com. (2020). *Apa Itu AJB Tanah? Ini Penjelasan Lengkap Dengan Cara Membuatnya*. Retrieved from <https://www.rumah.com/panduan-properti/ajb-tanah-6906>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Mr. Subekti dan R. Tjitrosuidio. Jakarta: Pradnya Paramita. 1960.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252)

Indonesia, Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624)

Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 777)

Indonesia, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 696/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel)